

TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI SITUS WEB

Victoria K. Priyambodo¹

priyambodo.victoria@unram.ac.id

¹ Universitas Mataram

Novia Rizki²

noviarizki@unram.ac.id

² Universitas Mataram

Paradisa Sukma³

paradisasukma@unram.ac.id

³ Universitas Mataram

ABSTRAK

Internet telah diadopsi sebagai salah satu dari beberapa cara untuk mewujudkan dan mencapai transparansi yang lebih besar berkaitan dengan kegiatan pemerintah. Internet, secara umum, dan situs web resmi, khususnya, secara mendasar telah mengubah hubungan antara warga negara dan pemerintah dengan memfasilitasi akses ke sejumlah besar data kinerja pemerintah. Masyarakat harus mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan, untuk tujuan ini, informasi yang dilaporkan harus jelas, tepat waktu, relevan, dan berkualitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs web resmi pemerintah dengan sampel 30 pemerintah kota se-Jawa dan Bali. Melalui analisis konten, hasil studi ini menunjukkan bahwa sebesar 73% Pemerintah Kota memiliki skor indeks aksesibilitas di atas 7. Sebagian besar situs web pemerintah kota memiliki tampilan yang beragam sehingga cukup sulit menentukan letak data laporan keuangan untuk tiap pemerintah kota.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Analisis Konten, Situs Web, Transparansi, Pelaporan Keuangan Internet

ABSTRACT

The Internet has been adopted as one of several ways to actualize and achieve greater transparency with regard to government activities. The Internet, in general, and official websites, have fundamentally changed the relationship between citizens and government by facilitating access to vast amounts of government performance data. The public must control the activities carried out by public officials and, for this purpose, the information reported must be clear, timely, relevant, and of high quality. This study aims to analyze the availability and accessibility of local government financial reports through official government websites with a sample of 30 cities in Java and Bali. Through content analysis, the results of this study show that 73% of City Governments have an accessibility index score above 7. Most city government websites have various views, so it is quite difficult to determine each city government's financial report data location.

Keywords: Accessibility, Content Analysis, Internet Financial Reporting, Transparency, Websites

PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan publik pada era *New Public Management* menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap pelaporan keuangan sektor publik (Bonsón et al., 2012; DePaula, 2023; Tejedro-Romero & de Araujo, 2018). Menurut Tejedro-Romero & de Araujo (2018), faktor kunci dalam mekanisme akuntabilitas di administrasi publik adalah transparansi. Transparansi menjadi sumber penting bagi warga untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dari kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi korupsi, dan membuat pejabat bertanggung jawab atas tindakan dan hasil yang dihasilkan (Tejedro-Romero & de Araujo, 2018).

Cifuentes-Faura et al. (2023) menjabarkan bahwa warga negara adalah penerima layanan yang ditawarkan oleh pemerintah, mereka juga berkontribusi pada pembiayaannya dengan membayar pajak dan, dengan memilih perwakilan politik yang membentuk pemerintahan. Masyarakat harus mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan, untuk tujuan ini, informasi yang dilaporkan harus jelas, tepat waktu, relevan, dan berkualitas tinggi (Cifuentes-Faura et al., 2023). Transparansi memfasilitasi penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan pemerintah, memungkinkan warga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pengawasan tindakan publik (Cifuentes-Faura et al., 2023).

Menurut Styles & Tennyson (2007), produksi laporan keuangan tahunan hanya salah satu bagian dari persamaan akuntabilitas. Di sisi lain, akses terhadap informasi adalah kondisi yang diperlukan agar akuntabilitas berlangsung (Styles & Tennyson, 2007). da Cruz et al. (2016) menjelaskan keyakinan normatif yang ada adalah bahwa semua tingkat pemerintahan harus melaporkan 'mengapa, bagaimana, apa, dan berapa banyak' terlibat dalam kegiatan mereka, dan pelaporan ini harus tersedia bagi warga negara dengan cara yang paling nyaman (da Cruz et al., 2016).

Perhatian terhadap konsep transparansi dan akuntabilitas menurut Lowatcharin & Menifield (2015) tampaknya telah digabungkan dengan kemunculan dan perkembangan teknologi informasi (TI) dan perubahan dalam lingkungan sehubungan dengan fakta bahwa internet telah diadopsi sebagai salah satu dari beberapa cara untuk mewujudkan dan mencapai keterbukaan yang lebih besar berkaitan dengan kegiatan pemerintah (Bonsón et al., 2012; Margetts, 2011). Situs web dan media sosial baru-baru ini menjadi teknologi informasi komunikasi yang diadopsi secara luas di lembaga pemerintah baik pusat dan daerah, menyoroti pentingnya penyediaan informasi pemerintah secara daring dan komunikasi dengan publik (DePaula, 2023). Sementara media sosial, dan khususnya Twitter, menyediakan kemampuan untuk membuat pesan teks yang cepat dan singkat, serta berpotensi mencakup tautan, gambar, dan/atau video, situs web pemerintah pada dasarnya adalah situs untuk penyediaan informasi yang lebih terperinci, untuk menyimpan dokumen, aplikasi, dan untuk layanan daring (DePaula, 2023).

Internet, secara umum, dan situs web resmi, khususnya, secara mendasar telah mengubah hubungan antara warga negara dan pemerintah dengan memfasilitasi akses ke sejumlah besar data yang dapat dikumpulkan, didistribusikan, dan diubah oleh perusahaan swasta, jurnalis, organisasi sipil, dan masyarakat (da Cruz et al., 2016). Ortiz-Rodríguez et al. (2018) mengemukakan bahwa kepercayaan dan keyakinan publik dalam pemerintahan meningkat ketika informasi pemerintah disediakan melalui situs web. Selanjutnya, penulis seperti Jaeger & Bertot (2010) dan Ortiz-Rodríguez et al. (2018) berpendapat bahwa penggunaan internet oleh pemerintah mendorong transparansi dan mempertinggi minat warga negara dalam mengakses informasi pemerintah. Chowdhury (2018) menjelaskan bahwa prasyarat penting untuk efektivitas teknologi informasi komunikasi dan portal web di pemerintahan adalah tersedia secara luas dalam bentuk yang dikembangkan dan dikelola

dengan baik. Salah satu aspek penting dalam transparansi laporan keuangan melalui situs web yaitu aksesibilitas laporan tersebut bagi pengguna.

Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Republik Indonesia, 2008) telah mendorong keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Penyebarluasan laporan tahunan adalah tanggung jawab dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut. Verawaty (2016) berpendapat bahwa pemerintah sebagai entitas yang berinvestasi pada teknologi informasi dalam bentuk *e-government* menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemangku kepentingan publik dari *e-government* telah memaksimalkan penggunaan teknologi, sehingga tidak hanya pada tingkat pemerintah daerah harus memiliki *e-government*, tetapi juga memaksimalkan penggunaannya untuk aspek akuntansi (Verawaty, 2016).

Da Cruz et al. (2016) menjelaskan bahwa teknologi informasi, secara umum, dan situs web pemerintah, khususnya, memiliki potensi untuk menciptakan bentuk baru dialog dan interaksi informal yang memungkinkan keterlibatan dan partisipasi warga negara yang lebih besar dalam hal-hal yang memengaruhi mereka secara langsung. Informasi yang tersedia di situs web pemerintah meningkatkan akses publik ke informasi dan berkontribusi untuk menciptakan warga negara yang lebih terinformasi (Da Cruz et al., 2016). Kecenderungan ini menunjukkan perlunya penilaian sejauh mana pemerintah bersedia dan mampu mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada warganya, yaitu menuntun pengembangan alat yang tepat untuk mengevaluasi transparansi pemerintah. secara lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses. Dimensi transparansi yang diamati dalam studi ini yaitu berkaitan dengan aksesibilitas dan kejelasan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs web resmi pemerintah dengan sampel 30 pemerintah kota se-Jawa dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 73% Pemerintah Kota memiliki skor indeks aksesibilitas di atas 7. Sebagian besar situs web pemerintah kota memiliki tampilan yang beragam sehingga cukup sulit menentukan letak data laporan keuangan untuk tiap pemerintah kota.

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi

Secara umum, transparansi dalam pemerintahan merujuk pada keterbukaan sistem pemerintahan melalui proses dan prosedur yang jelas serta kemudahan akses informasi publik bagi warga negara (Chen & Han, 2019). Tejedo-Romero & Araujo (2020) menjelaskan bahwa hal ini mengacu pada sisi permintaan transparansi yaitu aksesibilitas dan kegunaan informasi oleh warga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga mengacu pada sisi penawaran transparansi yaitu ketersediaan informasi tentang operasi pemerintah, prosedur, dan proses pengambilan keputusan (Tejedo-Romero & Araujo, 2020).

Pelepasan informasi yang tepat waktu dan akurat tentang operasi pemerintah memungkinkan pengamat eksternal untuk menentukan apakah pemerintah beroperasi dalam parameter yang dapat diterima (Bearfield & Bowman, 2017). Ketika anggaran dan dokumen fiskal lainnya transparan dan dapat diakses publik, warga negara dan anggota legislatif dapat memeriksa dengan lebih baik bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan, mengalokasikan sumber daya yang langka, dan mengelola keuangan publik (Chen & Han, 2019). Transparansi bukan hanya tentang menyediakan informasi secara acak, ini tentang

membuat informasi yang relevan dapat diakses, informasi yang dapat membantu publik dalam memantau dan menilai operasi dan kinerja pemerintah (Bearfield & Bowman, 2017; Grimmelikhuijsen et al., 2013).

Di era digital, inisiatif transparansi berbasis web dilihat sebagai sarana yang hemat biaya dan nyaman untuk mendukung transparansi pemerintah (Chen & Han, 2019). Chen & Han (2019) berargumen bahwa penting bagi pemerintah untuk menyediakan platform daring berkualitas tinggi bagi warga negara untuk melacak informasi fiskal agar pemerintah tetap akuntabel dan meningkatkan kepercayaan warga negara. Harapannya adalah akses ke data akan memberdayakan warga negara, meningkatkan tingkat keterlibatan mereka dalam tata kelola, mendorong pemecahan masalah yang kreatif, dan, pada akhirnya, menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif (Bearfield & Bowman, 2017).

Penggunaan internet sebagai media pengungkapan laporan keuangan telah banyak digunakan di sektor privat. Internet telah memungkinkan perusahaan untuk mengomunikasikan informasi lebih nyaman dan berpotensi lebih mudah diakses ke berbagai pemangku kepentingan mereka (Styles & Tennyson, 2007). Seperti sektor swasta, sektor publik telah memanfaatkan internet. Di semua tingkat dan adopsi dalam bentuk *e-government* memainkan peran penting dalam administrasi publik (Alcaide Muñoz et al., 2017; Alcaraz-Quiles et al., 2015; Birchall, 2015; Flyverbom, 2015). Inisiatif pemerintah terbuka seperti portal data, situs web untuk pemantauan publik atas pengeluaran pemerintah, alat media sosial, dan pertemuan daring serta umpan balik publik tentang kebijakan dan peraturan publik telah memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, partisipasi, dan kolaborasi pemerintah (Da Cruz et al., 2016).

Styles & Tennyson (2007) menyatakan bahwa *e-government* memungkinkan instansi pemerintah untuk memberikan informasi dan memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui situs web mereka. *E-government* memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, memberikan informasi dan melengkapi warga negara untuk mengambil peran aktif dalam urusan publik (Alcaide Muñoz et al., 2017; Flyverbom, 2015). Rencana strategis untuk pelaksanaan *e-government* dimaksudkan untuk menggeneralisasi penggunaan teknologi baru di bidang administrasi publik dan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan warga negara untuk berkomunikasi pandangan mereka atau keluhan mengenai isu-isu publik untuk mempengaruhi pengembangan atau pelaksanaan kebijakan publik (Alcaide Muñoz et al., 2017; Birchall, 2015). Halaman web resmi pemerintah mungkin merupakan bentuk teknologi berbasis internet yang paling tahan lama untuk menyediakan informasi pemerintah daerah, sehingga mengamankan tujuan transparansi jangka panjang (da Cruz et al., 2016). Tingkat transparansi yang lebih tinggi dan pengukuran yang tepat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah kepada warganya dan sangat menentukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola (da Cruz et al., 2016).

Determinan Penyebarluasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Situs Web

Alcaide Muñoz et al. (2017) menjabarkan bahwa internet adalah saluran komunikasi yang baik untuk membuat informasi dapat diakses oleh sejumlah besar pengguna dengan biaya rendah serta memusatkan permintaan pengguna akan informasi, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi ketika mereka harus membuat keputusan keuangan. Internet dapat mengungkapkan data keuangan secara terus menerus dan meningkatkan fleksibilitas informasi yang diberikan oleh laporan keuangan dengan memperkenalkan angka atau elemen yang membuat informasi tersebut lebih menarik dan dapat dipahami oleh pengguna (Alcaide Muñoz et al., 2017). Jadi, pengungkapan informasi

keuangan melalui internet dapat membantu administrator publik bertanggung jawab secara publik dan mendorong dialog mengenai penggunaan sumber daya keuangan publik (Alcaide Muñoz et al., 2017).

Beberapa studi telah menginvestigasi tingkat penyebarluasan atau tingkat transparansi informasi keuangan melalui internet di sektor publik di berbagai tingkat pemerintah daerah. Lowatcharin & Menifield (2015) dalam studinya memberikan temuan bahwa total luas lahan, kepadatan penduduk, persentase penduduk minoritas, pencapaian pendidikan, dan bentuk dewan manajer pemerintah secara statistik terkait dengan tingkat transparansi pemerintah yang lebih tinggi di tingkat kabupaten melalui Internet. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Ortiz-Rodríguez et al. (2018) memberikan bukti bahwa keadaan finansial (utang, defisit) pemerintah pusat memengaruhi penyebarluasan informasi keuangan di internet.

Tejedo-Romero & de Araujo (2018) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, jenis kelamin, jumlah pemilih pemilu, dan kekuatan politik memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat transparansi. Di sisi lain, tidak terdapat bukti yang signifikan untuk variabel lain seperti investasi dan tekanan fiskal pada tingkat transparansi. Tejedo-Romero & de Araujo (2018) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang terbaik untuk menjelaskan variasi dalam tingkat transparansi dalam periode krisis adalah terkait dengan faktor-faktor politik. Penelitian (Chen & Han, 2019) menunjukkan bahwa politik tidak hanya mendorong reformasi transparansi tradisional (salinan dalam bentuk cetak) tetapi juga penting bagi situs web transparansi fiskal yang dikelola pemerintah (transparansi e-fiskal).

Temuan Bearfield & Bowman (2017) menunjukkan bahwa beberapa penjelasan untuk transparansi serupa di kota-kota besar dan kecil, yang lain bervariasi. Di kota-kota besar, jaringan organisasi, persaingan politik, dan permintaan akan transparansi adalah prediktor terkuat. Namun, di kota-kota kecil, sementara permintaan masyarakat dan jaringan organisasi tetap penting, sumber daya pemerintah dan profesionalisme pengelola kota memainkan peran penting (Bearfield & Bowman, 2017).

Studi oleh López-López et al. (2018) memberikan bukti hubungan tiga arah antara transparansi, reputasi, dan tingkat perkembangan *e-government* kota. Secara khusus, hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam otoritas lokal mempengaruhi reputasi otoritas tersebut, dan transparansi dipengaruhi oleh tingkat layanan *e-government* yang disediakan. Penelitian lain oleh Tejedo-Romero & Araujo (2020) menunjukkan hasil bahwa ideologi politik, jumlah pemilih, kedekatan pemilu, akses warga ke internet dan lokasi geografis mempengaruhi transparansi pemerintah kota.

Hasil penelitian Cifuentes-Faura et al. (2023) menunjukkan bahwa secara umum, transparansi mempengaruhi efisiensi, meskipun hal ini terkadang bergantung pada indikator khusus yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan pada metodologi yang digunakan untuk menghitungnya. Secara khusus, hasil studi Cifuentes-Faura et al. (2023) menunjukkan bahwa semakin besar transparansi ekonomi dan keuangan dan semakin banyak informasi tentang kontrak layanan publik dan tentang perencanaan kota dan pekerjaan umum, semakin efisien pemerintah kota, yaitu semakin optimal sumber daya langka yang dikelola oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Analisis konten digunakan untuk membandingkan konten dengan cara yang sistematis, kompleks, dan objektif (Bonsón et al., 2019).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Sampel penelitian yang diambil yaitu 30 Pemerintah Kota yang berada di wilayah Jawa dan Bali.

Data

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah kota menyediakan data Laporan Keuangan pada situs web resmi mereka. Mengikuti pendekatan yang seragam, peneliti mencari situs pemerintah kota yang resmi di internet dan melakukan analisis konten standar dari setiap situs web. Untuk mengukur transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti menggunakan Indeks Aksesibilitas 10 poin yang diadopsi dari Styles dan Tennyson (2007) serta telah digunakan oleh Verawaty (2016). Tabel 1 berikut menunjukkan Komponen Indeks Aksesibilitas. Pencarian kata kunci yang digunakan termasuk ‘laporan keuangan’; ‘LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)’; ‘LHP (laporan Hasil Pemeriksaan)’. Data diambil selama bulan Mei 2023.

Tabel 1. Komponen Indeks Aksesibilitas (*Accessibility Index*)

1 poin jika <i>website</i> resmi kota muncul pada halaman pertama hasil pada pencarian <i>google</i> atau <i>yahoo</i> menggunakan nama kota dan negara.	(A)
+ 1 poin jika <i>website</i> resmi kota memiliki <i>link</i> data LKPD* di beranda situs <i>web</i> .	(B)
+ 1 poin jika <i>website</i> resmi kota memiliki mesin pencari yang menemukan LKPD menggunakan istilah LKPD dan/ atau laporan keuangan.	(C)
+ 1 poin jika memerlukan 3 atau kurang halaman <i>web</i> (atau klik <i>mouse</i>) untuk melihat data LKPD dari halaman utama situs kota.	(D)
+ 1 poin jika LKPD tersedia di <i>website</i> resmi kota dengan format pdf atau HTML.	(E)
+ 1 poin jika kota menyediakan data LKPD di lebih dari satu berkas; berkas untuk berbagai bagian/halaman dokumen LKPD lengkap.	(F)
+ 1 poin jika berkas individual menyediakan data LKPD kurang dari 3 MB.	(G)
+ 1 poin jika situs <i>web</i> resmi kota menyediakan data LKPD untuk tahun sebelumnya.	(H)
+ 1 poin jika situs web resmi kota menyediakan informasi untuk memperoleh atau mengakses salinan cetak LKPD.	(I)
+ 1 poin jika situs web resmi kota memberikan rincian kontak (telepon dan/ atau email) untuk individu/ departemen yang menyusun LKPD.	(J)
Poin Total = 10	

Sumber: Diadopsi dari Styles dan Tennyson (2007)

Mengacu pada Verawaty (2016), dalam tulisan ini, *e-government* yang diklasifikasikan dalam praktik IFR (*Internet Financial Reporting*) ketika memberikan di *website* seperangkat laporan keuangan dan/ atau ikhtisar keuangan yang diambil dari laporan keuangan (termasuk laporan keuangan parsial dan/ atau ringkasan). Pengungkapan penuh adalah ketika memberikan empat komponen laporan keuangan, yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan hasil indeks aksesibilitas yang disusun untuk melihat tingkat penyebaran informasi laporan keuangan pemerintah kota di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa seluruh sampel yaitu 30 pemerintah kota telah memiliki situs web resmi. Situs resmi yang muncul di mesin pencarian berjumlah 29 situs resmi pemerintah kota, dan satu situs web yaitu pemerintah kota Cirebon tidak dapat ditemukan (Indeks A). Secara keseluruhan, tidak ada pemerintah kota yang memiliki indeks aksesibilitas sempurna yaitu 10 poin.

Setiap situs web resmi pemerintah kota memiliki desain dan format penyajian masing-masing. Beberapa petunjuk mengenai letak pengungkapan laporan keuangan sulit ditemukan di beberapa situs web, sehingga cukup menghabiskan waktu bagi pengguna yang ingin mengetahui informasi keuangan yang disajikan pemerintah kota. Secara spesifik, hanya 33% dari sampel yang memberikan kemudahan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah kota (Indeks B), serta hanya 30% yang memiliki mesin pencarian yang langsung menghubungkan dengan letak pengungkapan informasi keuangan (Indeks C). Sekitar 60% sampel dapat diakses hanya dengan tiga kali klik halaman untuk melihat data laporan keuangan (Indeks D). Sebagian besar sampel tidak menggunakan kata kunci seperti 'laporan keuangan' di beranda situs web, tetapi mencantumkan kata kunci 'transparansi'. Hanya 9 situs web pemerintah kota yang dapat menemukan laporan keuangan melalui mesin pencarian, sedangkan situs web lainnya hanya merujuk pada berita. Namun demikian, sebagian besar situs web pemerintah kota mencantumkan tautan ke laman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebanyak 87% pemerintah kota menyediakan laporan keuangan dengan format pdf atau HTML yang dapat diunduh oleh pengguna (Indeks E) dengan ukuran berkas kurang dari 3 MB (Indeks G). Sekitar 87% sampel pemerintah kota menyediakan data laporan keuangan di beberapa berkas (Indeks F). Data laporan keuangan yang tersedia melalui laman ppid yang terhubung dengan situs web resmi pemerintah kota mencakup laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran dalam beberapa tahun (Indeks H). Indeks I dan Indeks J mengenai pencantuman informasi dan rincian kontak untuk mengakses laporan keuangan versi cetak biasanya tidak tersedia di laman situs resmi pemerintah kota, tetapi harus melewati laman ppid.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian pemerintah kota yang telah menyajikan data mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah yang tercantum di beranda situs web, sedangkan sebagian besar lainnya mencantumkan tautan ke laman ppid. Kata kunci yang digunakan sering kali berbeda seperti 'transparansi dan akuntabilitas', 'transparansi pengelolaan anggaran', 'dokumen keuangan daerah' dan lainnya. Sebagian besar situs web pemerintah kota memiliki tampilan yang beragam sehingga cukup sulit menentukan letak data laporan keuangan untuk tiap pemerintah kota. Format penyajian serta volume informasi yang diungkapkan secara daring juga tampaknya hampir sama dengan yang tersedia dalam bentuk cetak. Pengguna yang bukan berlatar belakang bidang akuntansi, keuangan, atau administrasi publik kemungkinan akan kesulitan untuk mencari data laporan keuangan tersebut. Hal ini senada dengan studi oleh Alcaide Muñoz et al. (2017) yang menjabarkan

bahwa informasi daring mungkin tidak dapat diakses oleh beberapa kelompok pengguna yang paling terpengaruh oleh aktivitas pemerintah karena kurangnya keterampilan teknologi, infrastruktur, pendidikan, atau bahasa yang dibutuhkan untuk menggunakan situs web resmi pemerintah. (Alcaide Muñoz et al., 2017) menjelaskan bahwa tingkat penyebaran internet merupakan penentu utama pengungkapan informasi berbasis internet; yang tingkat umum penggunaan internet lebih tinggi, pengguna akan mengharapkan pemerintah untuk menyediakan lebih banyak informasi secara daring.

Tejedo-Romero & Araujo (2020) menunjukkan bahwa pentingnya akses warga ke internet merupakan faktor yang sangat relevan untuk tingkat transparansi yang lebih tinggi. Difusi internet secara keseluruhan telah berkontribusi pada peningkatan kemampuan warga untuk mengakses dan menjelajahi situs web pemerintah kota untuk mendapatkan informasi. Keduanya merupakan alat penting untuk penyebaran informasi kota. Penyampaian informasi keuangan yang telah ditetapkan dengan standar tidak cukup untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas publik; Oleh karena itu, informasi yang lebih komprehensif diperlukan dan diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program (Adi et al., 2016).

Tabel 2. Indeks Aksesibilitas Pemerintah Kota

No.	Kota	Alamat situs web	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Total
1	Kota Bandung	https://www.bandung.go.id/	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
2	Kota Bekasi	https://bekasikota.go.id/	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	7
3	Kota Bogor	https://kotabogor.go.id/	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
4	Kota Cirebon	www.cirebonkota.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Depok	https://www.depok.go.id/	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
6	Kota Sukabumi	https://sukabumikota.go.id/	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
7	Kota Cimahi	https://cimahikota.go.id/	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
8	Kota Tasikmalaya	https://www.tasikmalayakota.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
9	Kota Banjar	https://banjarkota.go.id/	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
10	Kota Cilegon	http://www.cilegon.go.id/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Kota Tangerang	https://tangerangkota.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
12	Kota Serang	https://serangkota.go.id/	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	6
13	Kota Tangerang Selatan	https://www.tangerangselatankota.go.id/	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
14	Kota Magelang	https://magelangkota.go.id/	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9

15	Kota Pekalongan	https://pekalongankota.go.id/	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	6
16	Kota Salatiga	https://salatiga.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
17	Kota Semarang	https://semarangkota.go.id/	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	6
18	Kota Surakarta	https://surakarta.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
19	Kota Tegal	www.tegalkota.go.id	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8
20	Kota Yogyakarta	https://www.jogjakota.go.id/	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	6
21	Kota Blitar	https://www.blitarkota.go.id/	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7
22	Kota Kediri	https://www.kedirikota.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
23	Kota Madiun	https://madiunkota.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
24	Kota Malang	https://malangkota.go.id/	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
25	Kota Mojokerto	https://www.mojokertokota.go.id/	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
26	Kota Pasuruan	https://pasuruankota.go.id/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Kota Probolinggo	https://probolinggokota.go.id/	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
28	Kota Surabaya	https://www.surabaya.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
29	Kota Batu	https://batukota.go.id/	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7
30	Kota Denpasar	https://www.denpasarkota.go.id/	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7
Total			29	10	9	18	26	26	25	26	14	13	

KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu fokus dalam reformasi manajemen keuangan sektor publik. Transparansi tersebut salah satunya dapat diberikan dalam bentuk penyebaran informasi finansial secara daring atau melalui media internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas data laporan keuangan pemerintah kota di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa hanya 33% pemerintah kota yang telah menyajikan data laporan keuangan dan lebih sedikit yang menyajikan secara lengkap melalui situs web resmi pemerintah kota, sedangkan sisanya harus ditelusuri lebih lanjut melalui tautan ke laman ppid. Sebagian besar situs web memiliki tampilan yang rumit sehingga menyulitkan pengguna dalam mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam penyebarluasan informasi finansial pemerintah kota khususnya melalui internet kepada masyarakat luas. Selain itu, diperlukan peraturan tegas untuk mengatur format dan komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh pemerintah daerah melalui media internet. Dengan demikian, akses laporan keuangan terhadap masyarakat menjadi lebih mudah dan masyarakat akan lebih tertarik untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

REFERENSI

- Adi, S., Martani, D., Pamungkas, B., & Simanjuntak, R. A. (2016). Analysis of the quality of performance report of the local government on websites: Indonesian case. *Cogent Business and Management*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2016.1229393>
- Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures. *American Review of Public Administration*, 47(5), 550–573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>
- Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2015). Factors determining online sustainability reporting by local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 79–109. <https://doi.org/10.1177/0020852314541564>
- Bearfield, D. A., & Bowman, A. O. M. (2017). Can You Find It on the Web? An Assessment of Municipal E-Government Transparency. *American Review of Public Administration*, 47(2), 172–188. <https://doi.org/10.1177/0275074015627694>
- Birchall, C. (2015). ‘Data.gov-in-a-box’: Delimiting transparency. *European Journal of Social Theory*, 18(2), 185–202. <https://doi.org/10.1177/1368431014555259>
- Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019). Twitter as a tool for citizen engagement: An empirical study of the Andalusian municipalities. *Government Information Quarterly*, 36(3), 480–489. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.001>
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Chen, C., & Han, Y. (2019). Following the money: The political determinants of E-fiscal transparency in US states. *Public Management Review*, 21(5), 732–754. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1523451>

- Chowdhury, S. (2018). Do government web portals matter for citizen engagement in governance? A study of rural local government digital centres in Bangladesh. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 40(2), 132–141. <https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1483051>
- Cifuentes-Faura, J., Benito, B., Guillamón, M. D., & Faura-Martínez, Ú. (2023). Relationship between Transparency and Efficiency in Municipal Governments: Several Nonparametric Approaches. *Public Performance and Management Review*, 46(1), 193–224. <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2123007>
- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>
- DePaula, N. (2023). Political ideology and information technology in government online communication. *Government Information Quarterly*, 40(1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101747>
- Flyverbom, M. (2015). Sunlight in cyberspace? On transparency as a form of ordering. *European Journal of Social Theory*, 18(2), 168–184. <https://doi.org/10.1177/1368431014555258>
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The effect of transparency on trust in government: A cross-national comparative experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and technological change: Ensuring equal and sustained public access to government information. *Government Information Quarterly*, 27(4), 371–376. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.003>
- López-López, V., Iglesias-Antelo, S., Vázquez-Sanmartín, A., Connolly, R., & Bannister, F. (2018). e-Government, Transparency & Reputation: An Empirical Study of Spanish Local Government. *Information Systems Management*, 35(4), 276–293. <https://doi.org/10.1080/10580530.2018.1503792>
- Lowatcharin, G., & Menifield, C. E. (2015). Determinants of Internet-enabled Transparency at the Local Level. *State and Local Government Review*, 47(2), 102–115. <https://doi.org/10.1177/0160323x15593384>
- Margetts, H. (2011). The Internet and Transparency. *Political Quarterly*, 82(4), 518–521. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2011.02253.x>
- Ortiz-Rodríguez, D., Navarro-Galera, A., & Alcaraz-Quiles, F. J. (2018). The Influence of Administrative Culture on Sustainability Transparency in European Local Governments. *Administration and Society*, 50(4), 555–594. <https://doi.org/10.1177/0095399715616838>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management; Spring*, 19(1), 56–92.
- Tejedo-Romero, F., & Araujo, J. F. F. E. (2020). E-government-enabled transparency: The effect of electoral aspects and citizen's access to Internet on information disclosure. *Journal of Information Technology and Politics*, 17(3), 268–290. <https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1713958>

Tejedo-Romero, F., & de Araujo, J. F. F. E. (2018). Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data. *Administration and Society*, 50(4), 527–554. <https://doi.org/10.1177/0095399715607288>

Verawaty, V. (2016). The Comparative Analysis of Accessibility Index Value of Government Internet Financial Reporting In Indonesia. *Applied Finance and Accounting*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.11114/afa.v2i2.1214>